

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan untuk mengalami suatu kemajuan ke arah yang lebih baik, belanja pemerintah sangat erat kaitannya dengan pembangunan baik itu di pusat maupun di daerah. Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional maupun daerah adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2013). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, laju perubahannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit. Kota Kupang merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pertumbuhannya merupakan yang tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tabel 1.1 menunjukkan Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang selama 5 (lima) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang
Tahun 2010-2019

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2010	8.23
2	2011	8.26
3	2012	7.34
4	2013	7.58
5	2014	6.82
6	2015	6.63
7	2016	6.74
8	2017	6.83
9	2018	6.59
10	2019	6.03

Sumber: BPS Kota Kupang, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Pertumbuhan Ekonomi Kota Kupang pada tahun 2010-2019 mengalami Fluktuasi. Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 6.83 %.

Belanja Langsung menurut Mendagri No 13 Tahun 2006 adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang di sediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD jadi belanja langsung adalah ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Alokasi anggaran belanja daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) alokasi belanja langsung, yang terdiri dari belanja modal, belanja barang jasadn belanja pegawai. Alokasi belanja langsung ini juga sering dikenal dengan belanja pembangunandikarenakan alokasi anggaran yang ada

di dalamnya benar-benar di alokasikan untuk pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. (b) alokasi belanja tidak langsung, dimana pengalokasian anggaran ini lebih banyak ditujukan untuk alokasi belanja sosial, seperti belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja transfer kepada pemerintah dibawah, dan lain-lain alokasi belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan. Kota kupang merupakan salah satu daerah pusat kota di Nusa Tenggara Timur yang perkembangannya cukup menjanjikan, dimana salah satunya adalah perkembangan kota yang sedikit demi sedikit mulai beralih dari daerah agraris menjadi daerah industrialis, hal ini tentu saja memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap alokasi anggaran kota Kupang. Tabel 1.2 menunjukkan Alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung Kota Kupang selama 10 (Sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.2
Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kota Kupang Tahun (Ribu Rupiah) 2010-2019

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2010	Rp. 348.169.003	Rp. 209.444.987
2011	Rp. 398.815.346	Rp.194.084.225
2012	Rp. 484.778.576	Rp. 189.339.176
2013	Rp. 537.572.682	Rp. 258.899.845
2014	Rp. 574.625.071	Rp. 327.776.922
2015	Rp. 618.720.916	Rp. 373.344.823
2016	Rp. 674.389.624	Rp. 498.852.509
2017	Rp. 474.904.702	Rp. 681.923.151
2018	Rp. 462.373.794	Rp. 715.123.633
2019	Rp. 442.459.256	Rp.619.515.806

Sumber: BPS Kota Kupang, 2021

Berdasarkan alokasi belanja langsung maupun tidak langsung pemerintah Kota Kupang dapat merencanakan pembangunan ekonomi yang diprioritaskan, dimana alokasi belanja ini yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kemandiran daerah serta memacu potensi-potensi yang dimiliki daerah yang tujuannya tentu

saja mensejahterakan masyarakat yang ada melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang?
2. Bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk melakukan penelitian yang sama atau penelitian lanjutan di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan, terlebih dalam pengelolaan keuangan atau fiscal, baik pemerintah pusat maupun daerah.